



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

**DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANYUMAS**



Purwokerto - 2015



KATA PENGANTAR



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, *bottom up planning* serta *top down planning*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kami mengharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas terutama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang obyektif kami harapkan guna terwujudnya Rencana Kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Banyumas, Januari 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BANYUMAS,


TUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si
NIP. 19600707 198601 2 001

 DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum	2
1. 3. Maksud dan tujuan	3
1. 4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	7
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III PRIORITAS DAN SASARAN KINERJA TAHUN 2016	30
3. 1. Kebijakan Pembangunan Nasional Pertanian	30
3. 2. Kebijakan Pembangunan Nasional Kehutanan	36
3. 3. Kebijakan Pembangunan Daerah	39
3. 4. Prioritas dan Sasaran SKPD	49
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016	52
4. 1. Program dan Kegiatan	52
BAB V PENUTUP	61



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Pembangunan Daerah bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan dengan RPJMD dan Renstra SKPD serta RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya Renja SKPD menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum SKPD.

1. 2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;
10. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas;

1. 3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas ini adalah membuat dokumen perencanaan pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan tahun 2016 sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2016.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah merumuskan program dan kegiatan, sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2016, untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan bidang pertanian perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Banyumas.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan perencanaan, SOTK SKPD, kewenangan SKPD, serta pedoman lain yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2014 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2014).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian tentang tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat : (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

BAB III. PRIORITAS DAN SASARAN KINERJA TAHUN 2016

3.1. Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional

Memuat tentang kajian kebijakan pembangunan pertanian secara nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada sektor pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional

Memuat tentang kajian kebijakan pembangunan kehutanan secara nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada sektor kehutanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.3. Kebijakan Pembangunan Daerah

Memuat tentang kajian kebijakan pembangunan daerah yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.4. Prioritas dan Sasaran SKPD

Berisikan uraian garis besar prioritas dan sasaran pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan kabupaten, dan Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BSAB V. PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2016 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun 2014 pada bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan implementasi dari program dan kegiatan pada tahun 2014, sebagai materi bagi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di tahun 2016.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2016, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas yang ingin dicapai;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2016, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;
- b. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi sesuai indikator RPJMD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai dalam tabel 2.1. berikut :



Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
0	PROGRAM SETIAP SKPD										
0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
0 0 1 19	Ketatausahaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (tahun)	5	1	1	1	100	1	2	40,00	
2 1 1 20	Operasional UPT Balai Benih Hortikultura	Terlaksananya opsional balai Benih Hortikultura (tahun)	5	1	1	1	100	1	2	40,00	
		Jumlah bibit tanaman unggul yang dihasilkan (batang)	50.000	12.600	12.000	12.600	100	10.000	22.600	45,20	
2 1 1 21	Operasional UPT Balai Benih Padi dan Palawija	Terlaksananya opsional Balai Benih padi Palawija (tahun)	5	1	1	1	100	1	2	40,00	
		jumlah jenis varietas benih unggul	35	6	6	6	100	6	12	34,29	
2 1 1 22	Operasional Kebun Bibit Permanen	Terlaksananya opsional Kebun Bibit Permanen (tahun)	5	1	1	1	100	1	2	40,00	
		Jumlah bibit tanaman unggul yang dihasilkan (batang)	175.000	27.000	20.000	27.000	100	44.000	71.000	40,57	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	PILIHAN										
2 1	Pertanian										
2 1 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah anggota Kelompok petani yang terbina									
2 1 15 2	Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	Jumah kelompok tani/gapoktan pelaku usaha agribisnis yang dibina	750	185	185	185	100	100	285	38,00	
2 1 15 3	Pembinaan Kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani/gapoktan/P3A yang dibina (kelompok)	1.500	306	306	306	100	125	431	28,73	
2 1 15 6	Pendukung kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian	Jumlah bantuan bibit tanaman (batang)	30.000	4.000	4.000	4.000	100	6.500	10.500	35,00	
		Jumlah subsidi beras yang diberikan (kg)	20.000	4.000	4.000	4.000	100	4.000	8.000	40,00	
2 2 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan rakyat dan lahan kritis yang tertanami (Ha)									
2 2 16 11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah peranan masyarakat dalam RHL (desa)	25	5	5	5	100	5	10	40,00	
		Luas hutan rakyat yang tertanami (Ha)	250	225	225	225	100	50	275	110,00	
		Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun (unit)	30	6	6	6	100	6	12	40,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2 2 16 15	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Menurunnya lahan kritis (Ha)	2.500	-	-	-	#DIV/0!	460	460	18,40	
		Luas hutan rakyat yang tertanami (Ha)	2.500	-	-	-	#DIV/0!	460	460	18,40	
		Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun (unit)	150	-	-	-	#DIV/0!	17	17	11,33	
2 2 17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (Ha)									
2 17 6	Pemeliharaan satwa yang dilindungi	Jumlah Rusa yang dilindungi (ekor)	125	24	25	24	96	25	49	39,20	
		Jumlah monyet ekor pangang yang dilindungi (ekor)	1.850	370	370	370	100	370	740	40,00	
2 2 17 7	Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional	Jumlah bibit tanaman penghijauan yang ditanam	30.000	10.000	10.000	10.000	100	7.800	20.000	66,67	
2 2 19	Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil hutan	Monitoring dan evaluasi Pengusaha Kayu, Perum PERHUTANI, Industri primer hasil kayu hutan, dan penerbit SKAU (lokasi)									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2 2 19 6	Pengendalian Peredaran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Jumlah pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan (lokasi industri)	135	27	27	27	100	105	132	97,78	
2 1 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah penyelenggaraan promosi (kali)									
2 1 17 7	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah pelaksanaan Promosi Komoditas Pertanian dan pengembangan pemasaran komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan (kali)	15	2	2	2	100	2	4	26,67	
2 1 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah jenis teknologi sektor pertanian / perkebunan yang diterapkan									
2 1 18 8	Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi	Tersedianya Data statistik pertanian (paket)	10	2	2	2	100	2	4	40,00	
2 1 18 9	Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan	Jumlah penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (jenis)	15	3	3	3	100	3	6	40,00	
2 1 18 13	Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah alat mesin pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sediakan (unit)	375	95	75	95	120	29	124	33,07	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2 1 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas pertanian, perkebunan (%)									
2 1 19 6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan yang di monitoring dan di evaluasi (kegiatan)	125	25	25	25	100	25	50	40,00	
2 1 19 12	Peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan	Jumlah pohon kelapa entog yang ditanam (batang)	500.000	85.000	85.000	85.000	100	100.000	185.000	37,00	
2 1 19 13	Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman	Jumlah Prasarana pengendali OPT (unit)	1.000	200	145	200	138	145	345	34,50	
		Jumlah sarana pengendali OPT (kg)	3.000	1.360	1.360	1.360	100	150	1.510	50,33	
2 1 19 19	Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah jaringan air permukaan/jaringan irigasi (lokasi)	50	6	6	6	100	20	26	52,00	
		Jumlah jaringan air permukaan/pompa air (unit)	75	27	27	27	100	20	47	62,67	
		Jumlah jaringan air tanah dalam (lokasi)	15	-	-	-	-	5	5	33,33	
		Jumlah sarana UPT (unit)	50	15	15	15	100	5	20	40,00	
2 1 19 28	Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah pohon cengkeh yang ditanam (batang)	100.000	18.000	20.000	18.000	90	18.000	36.000	36,00	
		Jumlah sarana perkebunan (unit)	200	40	40	40	100	28	68	34,00	
2 1 19 29	Peningkatan Prodksi Pertanian Organik	Terlaksananya pengembangan pertanian organik (komoditas)	5	1	1	1	100	1	2	40,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2 1 19 30	Penyusunan PERDA Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tersusunnya PERDA tentang LP2B (dokumen)	1	-	-	-	-!	1	1	100,00	
2 1 19 31	Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah	Pengembangan tanaman semusim dan rempah (Ha)	150	32	32	32	100	16	48	32,00	
		Pengembangan tanaman nilam (batang)	200.000	40.000	40.000	40.000	100	20.000	60.000	30,00	
		Pengembangan tanaman pala (batang)	25.000	5.000	5.000	5.000	100	1.500	6.500	26,00	
2 1 19 32	Pengembangan Pertanian hortikultura	Jumlah pengembangan komoditas hortikultura (komoditas)	30	6	6	6	100	6	12	40,00	

Dari tabel di atas terbaca bahwa perkiraan sampai dengan akhir tahun 2015 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014 - 2018.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran baru mencapai 40,00 persen dari target pelayanan administrasi perkantoran ditetapkan sejumlah 5 tahun, terlaksana 2 tahun, dengan target jumlah bibit tanaman hortikultura unggul yang dihasilkan sebesar 50.000 batang baru tercapai 22.600 batang, target pengembangan varietas benih padi dan palawija unggul sejumlah 35 jenis baru mencapai 6 jenis, target jumlah bibit tanaman perkebunan dan kehutanan unggul yang dihasilkan sejumlah 175.000 batang baru tercapai 71.000 batang.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mencapai 33,39 persen dari target Jumlah petani yang menerima bantuan ditetapkan sejumlah **2.250** orang, terlaksana 716 orang dan dari target jumlah bibit tanaman yang dibantukan sebesar 30.000 batang, baru teralisasi 10.500 batang.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mencapai 26,67 persen dari target Jumlah penyelenggaraan promosi yang diterapkan sejumlah 15 kali, akan terlaksana 4 kali.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan mencapai 37,69 persen dari target jenis teknologi sektor pertanian/perkebunan yang diterapkan sejumlah 15 jenis, baru terlaksana 6 jenis, dengan target pemenuhan alat mesin pertanian yang sediakan sebanyak 375 unit baru tercapai 124 unit
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan mencapai 42,99 persen. Target pengembangan tanaman kelapa 500.000 batang baru tercapai 185.000 batang, target pengembangan tanaman cengkeh sebesar 100.000 batang baru tercapai 36.000 batang. Target pengembangan tanaman semusim dan rempah sebesar 150 Ha baru tercapai 48 Ha.
6. Program rehabilitasi hutan dan lahan baru tercapai 39,69 persen dari target Luas hutan rakyat dan lahan kritis yang tertanami seluas 5.250 Ha, baru tertangani 1.195 Ha. Taget konservasi lahan seluas 3.000 Ha baru tercapai 1.200 Ha.
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan baru mencapai 48,62 persen dari target pemeliharaan satwa sejumlah 1.975 ekor, tercapai 789 ekor.
8. Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil hutan, baru mencapai 97,79 persen. Dari target monitoring dan evaluasi Pengusaha Kayu, Perum PERHUTANI, Industri primer hasil kayu hutan, dan penerbit SKAU sejumlah 135 Lokasi baru tercapai 135 lokasi.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Apabila ditinjau dari SPM yang ada, maka target SPM serta capaian dapat dijelaskan dalam Tabel 2.2. berikut :



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Banyumas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
2.	Pertanian													
2.1.	Pengembangan Tanaman Pangan													
			2.1.1. Produktivitas Padi Sawah (Ton/Ha)	6,04	6,09	6,14	6,19	6,24	4,98					
			2.1.2. Produktivitas Padi Gogo (Ton/Ha)	4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	4,88					
			2.1.3. Produktivitas jagung (ton/ha)	6,20	6,40	6,70	7,10	7,50	5,30					
			2.1.4. Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,00					
2.2.	Pengembangan Tanaman Hortikultura													
			2.2.1. Produksi Durian (kuintal)	31.659	32.005	32.870	33.235	34.600	21.032					
			2.2.2. Produksi Pisang (kuintal)	187.500	188.250	189.000	189.750	190.500	86.970					
			2.2.3. Produksi Cabe besar (kuintal)	5.665	7.629	9.715	11.921	13.140	2.301					
			2.2.4. Pengembangan komoditas tanaman hortikultura (jenis)	6	6	6	6	6	6					
2.3.	Pengembangan Tanaman Perkebunan													
			2.3.1. Produksi Cengkeh (ton)	262,95	292,95	322,95	352,95	382,95	414,55					



No	Indikator	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
			2.3.2. Luas Pengembangan tanaman cengkeh (Ha)	2.668,66	2.968,66	3.268,66	3.568,66	3.868,66	2.350,53					
			2.3.3. Produksi Nilam (ton)	998,62	1.048,62	1.098,62	1.148,62	1.198,62	986,74					
			2.3.3. Produksi Pala (ton)	9,79	9,81	9,83	9,85	9,87	11,40					
			2.3.4. Produksi Kelapa Dalam (ton)	13.492,41	13.792,41	14.092,41	14.392,41	14.962,41	13.303,27					
			2.3.5. Produksi Kelapa Deres (ton)	53.114,56	53.614,56	54.114,56	54.614,56	55.114,56	49.568,52					
			2.3.6. Pengembangan komoditas tanaman perkebunan (jenis)	4	4	4	4	4	4					
2.4.	Pengembangan sarana dan prasarana Pertanian Perkebunana dan Kehutanan													
			2.4.1. Pengembangan Jaringan irigasi (m)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8.834					
			2.4.2. Pengembangan Jalan usaha tani (m)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.220					
			2.4.3. Penambahan jumlah Traktor (unit)	30	30	30	30	30	30					
			2.4.4. Penambahan jumlah Pompa Air (unit)	25	25	25	25	25	39					
			2.4.5. Penambahan jumlah Power threaser (unit)	20	20	20	20	20	18					
			2.4.6. Penambahan jumlah Kendaraan Roda Tiga (unit)	10	10	10	10	10	10					



No	Indikator	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
2.5.	Kesejahteraan Petani													
			2.5.1. Jumlah kelompok tani dan kelompok masyarakat yang terbina	300	300	300	300	300	308					
			2.5.2. Cakupan bina kelompok tani	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	42,78					
			2.5.3. Nilai Tukar Petani (NTP)	104,56	104,58	104,60	104,62	104,64	101,72					
3.	Kehutanan													
3.1.	Penanggulangan Hutan dan Lahan Kritis													
			3.1.1. Luas lahan kritis (ha)	6.770	6.270	5.770	5.270	4.770	5.795					
			3.1.2. Luas Areal Hutan Rakyat (ha)	20.392	20.842	21.292	21.742	22.192	21.417					
			3.1.3. Luas rehabilitasi lahan dan hutan (Ha)	500	500	500	500	500	1.475					
			3.1.4. Pembuatan bangunan pengendali erosi (unit)	20	20	20	20	20	6					
3.2.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam													
			3.2.1. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (Ha)	200	200	200	200	200	60					

Dari tabel 2.2. di atas terbaca bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 capaian target kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan berkisar angka 20 persen. Hal ini ini dikarenakan tahun 2014 ini adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra SKPD 2014-2018.

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 30 indikator kinerja. Dari 30 indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja 17 indikator **telah memenuhi target**, sedangkan capaian indikator kinerja 13 indikator **belum memenuhi target**. Tidak tercapainya target tersebut karena :

- a. Indikator kinerja tercapainya produktivitas padi sawah dari target 6,04 ton/ha hanya tercapai 4,98 ton/ha. Faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang menurun tidak diimbangi dengan pemupukan yang sesuai kebutuhan unsur hara dan ramah lingkungan. Disamping itu, pada tahun 2014 terjadi serangan hama wereng yang menyebabkan terjadinya puso di hampir seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Banyumas seluas 1.925 Ha.
- b. Indikator kinerja tercapainya produktivitas jagung dari target 6,2 ton/ha hanya tercapai 5,30 ton/ha. Faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang menurun tidak diimbangi dengan pemupukan yang sesuai kebutuhan unsur hara dan ramah lingkungan.
- c. Indikator kinerja tercapainya produktivitas kedelai dari target 1,31 ton/ha hanya tercapai 1,00 ton/ha. Faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang menurun tidak diimbangi dengan pemupukan yang sesuai kebutuhan unsur hara dan ramah lingkungan. Disamping itu karena adanya hujan pada saat musim tanam mengakibatkan kedelai tidak tumbuh dengan baik.
- d. Indikator kinerja luas pengembangan tanaman cengkeh dari target 2.668,66 Ha hanya tercapai 2.350,53 Ha atau sebesar 88,08 persen. Upaya penambahan luas tanaman cengkeh dengan penanaman baru, juga diikuti dengan penebangan tanaman cengkeh. Penebangan dilakukan karena sebagian besar tanaman cengkeh di Kabupaten Banyumas relatif kurang produktif baik karena faktor usia maupun karena faktor pemeliharaan.
- e. Indikator kinerja produksi tanaman nilam dalam dari target sebesar 998,62 ton hanya tercapai 986,74 ton atau sebesar 98,81 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan areal tanam tanaman nilam. Penurunan luas areal tanam disebabkan karena animo masyarakat yang masih rendah.

- f. Indikator kinerja produksi tanaman kelapa dalam dari target sebesar 13.492,41 ton hanya tercapai 13.303,27 ton atau sebesar 98,60 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan areal tanam tanaman kelapa dalam. Penurunan luas areal tanam disebabkan karena terjadi penebangan tanaman tidak produktif.
- g. Indikator kinerja produksi tanaman kelapa deres dari target sebesar 53.114,56 ton hanya tercapai 49.548,52 ton atau sebesar 93,32 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan produktivitas tanaman kelapa deres yang disebabkan oleh faktor usia tanaman kelapa deres. Tanaman muda sebagai bentuk upaya peremajaan kelapa deres yang dilakukan, belum berproduksi.
- h. Indikator kinerja penambahan jumlah power treasher sejumlah 20 unit, baru tercapai 18 unit atau pencapaiannya hanya 90 persen. Hal ini disebabkan karena kebutuhan air pertanian lebih prioritas, sehingga alokasi untuk penambahan jumlah pompa air sebagai prasarana penyediaan air pertanian menjadi lebih utama.
- i. Indikator Kinerja jumlah bangunan pengendali erosi dicapai dengan predikat tidak baik karena pencapaiannya hanya 30 persen. Hal ini disebabkan alokasi anggaran untuk pengadaan bangunan pengendali semula direncanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, namun tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mendapatkan alokasi tersebut.
- j. Indikator Kinerja perlindungan dan konservasi sumber daya alam dicapai dengan predikat tidak baik karena pencapaiannya hanya 30 persen. Hal ini disebabkan jumlah bangunan pengendali erosi hanya tercapai 30 persen. Bangunan pengendali erosi adalah bentuk nyata upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu permasalahan penting dalam bidang pertanian, antara lain :

- a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
- b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, kurangnya sarana prasarana budidaya dan pengolahan lahan, dan keterbatasan sumber air.
- c. Rendahnya luas penguasaan lahan serta besarnya tekanan alih fungsi lahan
- d. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
- e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
- f. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani, yang tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP).

- g. Kurang terjaganya kuantitas, kualitas, kontinuitas produksi dan masih rendahnya daya saing hasil serta terbatasnya jaringan pemasaran hasil.
- h. Masih kurangnya penerapan teknologi pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian.

Dalam bidang kehutanan, isu penting permasalahan yang ada antara lain :

- a. Masih tingginya luas lahan kritis di Kabupaten Banyumas
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan penambahan luas areah hutan rakyat.

Pada sisi yang lain secara intern Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas masih menghadapi beberapa kendala antara lain :

- a. Ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan masih sangat terbatas.
- b. Kemampuan sumber daya manusia guna penanganan pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan maupun petugas lapangan secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas.
- c. Besarnya beban kerja karena terdapat beberapa kegiatan dana APBD Provinsi, dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan.

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dalam rancangan awal RKPD sebenarnya sudah cukup memadai, beberapa program disinkronisasi dengan program pada tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Program dan kegiatan yang ada disusun guna mendukung sepenuhnya pencaipain standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2016, sebagaimana tersebut pada tabel 2.2. berikut :



Tabel. 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prov	APBN	
00	PROGRAM SETIAP SKPD							
00 00	-							
00 00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan perasionalisasi UPT	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan perasionalisasi UPT (1 tahun)	1.850.000.000			
00 00 01 19	Ketatausahaan	Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Pelayanan administrasi ketatausahaan pada Dinnpertenbunhut Kabupaten Banyumas, 12 bulan	1.500.000.000	0	0	Kegiatan Ketatausahaan
00 00 01 20	Operasional UPT Balai Benih Hortikultura	Terpenuhinya Bibit Tanaman yang dapat disalurkan kepada Kelompok tani / petani	Banteran	tersedianya 6 jenis tanaman hortikultura dan bioarmaka	100.000.000	0		guna memelihara tanaman induk di UPT untuk menghasilkan bibit tanaman hortikulura dan biofarmaka untuk dibantukan kpd masyarakat
00 00 01 21	Operasional UPT Balai Benih Padi Palawija	Terpenuhinya kebutuhan Pengelolaan Benih Padi Sawah Unggul dan Palawija	Bojong	tersedianya benih padi unggul dan kedelai unggul	150.000.000	0		guna operasinal di UPT untuk menghasilkan benih padi dan palawija untuk dibantukan kpd masyarakat



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prop	APBN	
00 00 01 22	Operasional UPT Kebun Bibit Permanen	Terpenuhinya Bibit Tanaman Keras yang dapat disalurkan Kelompok Tani / Petani	Karang Bawang	tersedianya 30.000 batang bibit tanaman keras	100.000.000	0		guna operasinal di UPT untuk menghasilkan bibit tanaman keras untuk dibantukan kpd masyarakat
02	PILIHAN							
02 01	Pertanian							
02 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani	3 lokasi	3 lokasi	450.000.000	0	0	
02 01 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	masyarakat/kelompok tani	Semua Kecamatan	Pendampingan pelaku usaha agribisnis di 27 kecamatan	150.000.000	0	0	Kegiatan ini untuk membiayai pendampingan dan pembinaan pelaku agribisnis
02 01 15 06	Pendukungn kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian	Jumlah bantuan bibit tanaman (batang) masyarakat/petani	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya kegiatan pendukung kegiatan TMMD dan pasar murah	100.000.000	0	0	Lokasi menyesuaikan kegiatan TNI TMMD
02 01 15 10	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Kelompok Tani	Semua Kecamatan	Terselenggaranya pertemuan/pembinaan kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3 A dan lomba kelembagaan petani pada 27 Kec.	200.000.000	0	0	Kegiatan ini mebiayai pertemuan pelatihan kelompok tani
02 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			300.000.000	0	0	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prop	APBN	
02 01 17 01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terselenggaranya Promosi dan pameran produk pertanian Perkebunan dan Kehutanan	Kabupaten Banyumas	Terselenggaranya Promosi dan pameran produk pertanian Perkebunan dan Kehutanan	300.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai kegiatan pameran produksi pertanian perkebunan dan kehutanan
02 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/perkebunan di Kab. banyumas			2.200.000.000	0	1.250.000.000	
02 01 18 08	Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi	Terfasilitasinya akses informasi kepada masyarakat terkait Tupoksi SKPD	Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya akses informasi kepada masyarakat dan instansi terkait Tupoksi SKPD	100.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai kegiatan pegumpulan data statistik dan fasilitasi website dinas.
02 01 18 10	Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan	Jumlah penerapan teknologi pertanian tanaman pangan (jenis)	Kabupaten Banyumas	penerapan teknologi pertanian tanaman pangan di 27 kec	500.000.000	0	-	
		pengadaan bibit kedele	Kabupaten Banyumas	Pengembangan tana-man kedele di 15 Kec.	0	0	500.000.000	Kegiatan ini untuk membeli bibit kedele
		Pengadaan benih padi (Padi Gogo)	Kabupaten Banyumas	Pengadaan benih padi gogo di 10 Kec.	0	0	250.000.000	Kegiatan ini membiayai belanja benih tanaman padi gogo
		Pengadaan benih Padi Sawah	Kabupaten Banyumas	.Pengadaan benih padi sawah di 27 Kec.	0	0	500.000.000	Kegiatan ini membiayai belanja benih tanaman padi sawah
		Penyelenggaraan SLPTT	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya SLPTT di 27 Kec. Se kab. Banyumas	100.000.000	0	0	Kegiatan ini untuk membiayai pendampingan kegiatan SLPTT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prop	APBN	
02 01 18 14	Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	Pengadaan power treasher	Kabupaten Banyumas	.Pengadaan power treasher 20 unit	300.000.000	0	0	kegiatan ini untuk pengadaan power treasher
		Pengadaan hand traktor	Kabupaten Banyumas	tersedianya handtracktor 30 unit di kec. Banyumas	500.000.000	0	0	Kegiatan ini untuk pengadaan Handtracktor
		Pengadaan sarana prasarana pertanian	Kabupaten Banyumas	Tersedianya sarana prasarana pertanian / alsintan di 4 semua kec. di kab. banyumas	200.000.000	0	0	kegiatan ini untuk sarana prasarana pertanian / alsintan di seluruh kec.
		Pengadaan kendaraan roda tiga	Kabupaten Banyumas	tersedianya kendaraan roda tiga 10 unit	250.000.000	0	0	kegiatan ini sesuai usulan musrenbang kec. untuk pengadaan
		Pengadaan pompa air	Kabupaten Banyumas	tersedianya pompa air di 25 unit	250.000.000	0	0	kegiatan ini untuk pengadaan pompa air
02 01 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pengembangan infrastruktur pertanian			5.897.500.000	500.000.000	9.300.000.000	
02 01 19 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Seluruh Kegiatan di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya Monitoring, Pelaporan, dan evaluasi program dan kegiatan	150.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai kegiatan motoring,
02 01 19 12	Peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan	Kelapa Ganjah Entog	Kabupaten Banyumas	Meningkatnya populasi dan peremajaan kelapa di kab. Banyumas	1.500.000.000	0	0	Guna pengembangan tanaman kelapa
		Karet	Kabupaten Banyumas	tersedianya bantuan karet di 1 lokasi	0	0	25.000.000	Guna pengembangan tanaman karet
		Kakao	Kabupaten Banyumas	tersedianya bantuan kakao di 3 lokasi	0	0	25.000.000	Guna pengembangan tanaman kakao



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prop	APBN	
02 01 19 13	Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	Pengadaan power brender	Kabupaten Banyumas	Tersedianya sarana pengendali OPT	540.000.000	0	0	guna pengadaan sarana pengendali OPT
		Pengadaan emposan tikus	Kabupaten Banyumas	tersedianya Pengadaan emposan tikus 30 unit	30.000.000	0	0	
		Belarang	Kabupaten Banyumas	tersedianya belarang 500 kg	15.000.000	0	0	
		pestisida	Kabupaten Banyumas	tersedianya pestisida 200 kg	15.000.000	0	0	
		Gerakan pengendalian OPT	Kabupaten Banyumas	Terselenggaraeranya gerakan pengendalian OPT di Kab. Banyumas	15.000.000	0	0	kegiatan ini untuk membiayai gerakan pengendalian OPT
02 01 19 19	Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kabupaten Banyumas	Tersedianya jalan usaha tani, 27 Lokasi	405.000.000	0	2.700.000.000	
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Kabupaten Banyumas	Tersedianya Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha 36 Lokasi	540.000.000	0	3.600.000.000	
		Pengadaan sumur bor	Kabupaten Banyumas	tersedianya sumur bor untuk 10 lokasi	375.000.000	0	2.500.000.000	
		Pengadaan sarana prasarana pengairan	Kabupaten Banyumas	tersedianya sarana pengairan	37.500.000	0	250.000.000	
02 01 19 28	Pembinaan Lingkungan Sosial	Terlaksananya pemberian bantuan sarana produksi pertanian	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pemberian bantuan sarana produksi perkebunan	750.000.000	0	0	
02 01 18 29	Pengembangan Pertanian Organik	Tercapainya pengembangan Pertanian Organik	Kabupaten Banyumas	Peningkatan produksi Organik 1 Komoditas	300.000.000	0	0	untuk pelatihan pertanian organik, lomba kelompok tani



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			
					APBD Kab	APBD Prop	APBN	
02 01 19 30	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Banyumas	Terlindungnya lahan pertanian Produktif	300.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai pemebuatan perda LP2B.
02 01 19 31	Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah	pengembangan tanaman Nilam	Kabupaten Banyumas	Pengembangan Tanaman Nilam (5 Lokasi)	50.000.000	0	0	
		pengembangan tanaman Cengkeh	Kabupaten Banyumas	Pengembangan Tanaman Cengkeh (9 Lokasi)	400.000.000	0	0	
		pengembangan tanaman Tembakau	Kabupaten Banyumas	Pengembangan Tanaman Tembakau (4 Lokasi)	0	0	100.000.000	
		pengembangan tanaman Pala	Kabupaten Banyumas	tersedianya bibit pala 5.000 batang	50.000.000	0	0	
		pengembangan tanaman Tebu	Kabupaten Banyumas	Pengembangan Tanaman Tebu (10 Lokasi)	0	0	100.000.000	
02 01 19 35	Pengembangan pertanian hortikultura	Pengembangan tanaman Durian	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan tanaman Durian	100.000.000	0	0	
		Pengembangan tanaman Jambu Citra	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan tanaman Jambu	25.000.000	0	0	
		Pengembangan tanaman Duku	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan tanaman Duku	50.000.000	0	0	
		Pengembangan tanaman manggis	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan tanman manggis	75.000.000	0	0	
		Budidaya tanaman bengkoang	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan tan Bengkoang	25.000.000	0	0	
		Demplot tanaman hortikultura	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan Demplot	100.000.000	500.000.000	0	
		Budidaya jamur	Kabupaten Banyumas	Terlaksananya pengem- bangan jamur	50.000.000	0	0	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				
					APBD Kab	APBD Prop	APBN		
02 02	Kehutanan								
02 02 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	450 Ha, 20 unit bangunan konservasi tanah dan air			675.000.000	0	1.500.000.000		
02 02 16 05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	Kabupaten Banyumas	Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	300.000.000	0	1.500.000.000		
		Rehabilitasi Hutan Rakyat	Kec. Lumbir (canduk)	tersedianya rehabilitasi hutan rakyat di desa 2 lokasi	100.000.000	0	0		
		Bantuan bibit tanaman keras	Kec. Purwokerto barat	tersedianya bantuan bibit tanaman keras 1 lokasi	25.000.000	0	0		
02 02 16 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Desa Sekitar Hutan Negara	Meningkatnya Peran anggota masyarakat dalam membudidayakan dan mengolah hasil tanaman hutan di sekitar hutan (21 Desa)	250.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai kegiatan pertemuan kelembagaan masyarakat sekitar hutan	
02 02 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	terpeliharanya satwa yang dilindungi (Rusa dan (monyet ekor panjang)			200.000.000	0	0		
02 02 17 06	Pemeliharaan satwa yang dilindungi	Terpeliharanya tanaman dan Satwa yang dilindungi	kalibagor, wangon, kebasen	terpeliharanya satwa yang dilindungi (Rusa dan monyet ekor panjang)	100.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai pakan dan pemeliharaan kandang hewan/satwa yang di lindungi	
02 02 16 11	Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional	Terfasilitasinya Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional	Semua Kecamatan	Jumlah Bibit dalam Pelaksanaan Kegiatan HMPI dan BMN 9.000 batang	100.000.000	0	0	kegiatan ini membiayai kegiatan penanaman OBIT	



02 02 19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Terlaksananya cheking cruising pada hutan negara dan rekomendasi tebang pada hak hutan,			100.000.000	0	0	
02 02 19 06	Pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan	Industri Primer Hasil Hutan, Perhutani, Masyarakat pelaku usaha hasil hutan	Kabupaten Banyumas	Pengendalian Peredaran dan Penatausahaan Hasil Hutan di seluruh kec. di kab. banyumas	100.000.000	0	0	Kegiatan ini membiayai monitoring dan pelaporan penatausahaan hasil hutan
	TOTAL PAGU				11.672.500.000	500.000.000	12.050.000.000	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan



BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN KINERJA TAHUN 2016

3. 1. Kebijakan Pembangunan Nasional Pertanian

Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2016, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Tengah 2005–2025, dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Banyumas 2016.

Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang besar melalui keterkaitan input-output-outcomes antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia dalam di sektor pertanian.

1. VISI Kementerian Pertanian

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

2. MISI Kementerian Pertanian

- a. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.

- b. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- c. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pelayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- d. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- e. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- f. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- g. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- h. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- i. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
- j. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparat pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

- a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
- b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
- c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

4. Target Utama Kementerian Pertanian

Selama lima tahun ke depan dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- b. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- c. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

5. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

- a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).
- b. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), embaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan.
- c. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
- d. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.
- e. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor.
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani.
- g. Jaminan penguasaan lahan produktif.
- h. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
- i. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
- j. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
- k. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
- l. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
- m. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis

lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

- n. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.
- o. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi.
- p. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
- q. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
- r. Penguatan sistem perkarantina pertanian.
- s. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.
- t. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.
- u. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
- v. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
- w. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.

6. Strategi Kementerian Pertanian

Strategi pembangunan pertanian selama lima tahun ke depan dalam membangun pertanian di Indonesia adalah **TUJUH GEMA REVITALISASI** yaitu :

- a. Revitalisasi Lahan,
- b. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,
- c. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana,
- d. Revitalisasi SDM,
- e. Revitalisasi Pembiayaan Petani,

- f. Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan
- g. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

7. Program Kementerian Pertanian

Dua belas program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
- b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- d. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.
- e. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- f. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
- g. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
- i. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
- j. Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- k. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
- l. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

3. 2. Kebijakan Pembangunan Nasional Kehutanan

Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1. Prioritas pembangunan

Prioritas Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang, yaitu:

- 1) Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan 2 (dua) fokus prioritas, terdiri dari :
 - a) Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri.
 - b) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - c) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 2) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan 4 (empat) fokus prioritas, meliputi :
 - a) Pemantapan kawasan hutan.
 - b) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
 - c) Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - d) Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.

2. Visi Kementerian Kehutanan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas ditetapkan visi pembangunan kehutanan yaitu **“Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**.

3. Misi Kementerian Kehutanan

Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada:

- 1) Pemantapan kawasan hutan.
- 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
- 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati.
- 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.
- 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.

8) Penguatan kelembagaan kehutanan.

4. Prioritas Pembangunan Kementerian Kehutanan

Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan yaitu:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 paket.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7. Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife traficking sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Pengelolaan konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi plasma nutfah pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya.
9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.

15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.
16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket

5. Program Pembangunan Kementerian Kehutanan

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi.
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Kehutanan.
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

3. 3. Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah :

“ TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”

Pemerintahan yang bersih, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang sejahtera menurut Joseph Murphy pada bukunya "Think Yourself Rich" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta virtuous cycle dampak pembelajaran.

Masyarakat yang berbudaya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (good governance) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk

mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

- 3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah**

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani

diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan

memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, urban primacy yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan

pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat

beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mengemban salah satu misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu misi 3 **Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 :			
1.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi dan produktivitas pertanian/ perkebunan yang masih rendah	Degradasi sumberdaya lahan	Teknik budidaya pertanian ramah lingkungan
1.2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian/ Perkebunan	Daya serap dan keterbatasan kemampuan petani	tersedia paket teknologi tepat guna
1.3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan	Keterbatasan kepemilikan lahan dan modal usaha	Regulasi pemanfaatan ruang dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk
1.4	Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Kurangnya aksesibilitas petani terhadap pasar	Masih rendahnya Kuantitas, kualitas dan kontinyuasi produk pertanian	Luasnya peluang pasar
1.5	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luasnya hutan dan lahan kritis	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perbaikan hutan dan lahan	Meningkatnya kebutuhan hasil hutan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Menurunnya Sumber Daya Hutan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan Sumber Daya Hutan	Upaya Pengembangan Sumber Daya Hutan
1.7	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Meningkatnya Industri Hasil Hutan	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi	Regulasi dan kebijakan pemerintah

3. 4. Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas mempunyai tugas teknis operasional sebagian urusan pemerintahan daerah subbidang tanaman pangan dan hortikultura, subbidang perkebunan dan subbidang penunjang pada urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .

Sedangkan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Banyumas. Visi Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 adalah ***Terwujudnya Pemerintah Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.*** Visi tersebut dijabarkan menjadi visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, yaitu : ***Terwujudnya Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang produktif, efisien, berdaya saing dan lestari berwawasan lingkungan, serta berpotensi investasi, didukung pemerintahan yang bersih dan adil menuju kesejahteraan petani.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut disusun Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pertanian perkebunan dan kehutanan yang maju, berkeadilan, merata, berkelanjutan, berkerakyatan, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berpotensi investasi melalui pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengembangkan teknologi dan informasi serta penyediaan sarana prasarana produksi guna mewujudkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan hutan, pemanfaatan sumberdaya pertanian, kebun dan hutan secara lestari.
- d. Memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat sekitar lahan dan hutan
- e. Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian perkebunan dan kehutanan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2016, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan petani serta pemberdayaan petani pelaku agribisnis, dan meningkatkan pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan produksi produktifitas dan efisiensi usaha, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan.
4. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan serta penggunaan produk teknologi dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.
5. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.
6. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha kayu, Perum PERHUTANI, industri primer hasil kayu hutan, dan penerbit SKAU

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis.
2. Terlaksananya kajian dan uji terap teknologi sederhana dan ramah lingkungan dalam peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan dan hutan yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pendapatan petani, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan.
4. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi luasan lahan dan hutan kritis, sehingga sumberdaya hutan dapat berfungsi dalam pengendalian bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan bahaya kekeringan.
5. Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan serta pemberdayaan petani.
6. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha kayu, Perum PERHUTANI, industri primer hasil kayu hutan, dan penerbit SKAU



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

4. 1. Prioritas dan Sasaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Rancangan awal RKPD tahun 2013, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menyusun 8 program dengan 25 kegiatan, dengan perkembangan pembahasan tidak mengalami perubahan perbaikan tetap menjadi 8 program dan 25 kegiatan.

Program Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini adalah program yang dimiliki oleh seluruh SKPD di Kabupaten Banyumas guna menunjang kelancaran operasional pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani / masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan TNI dalam kegiatan pertanian, Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, dan pemberdayaan kelembagaan petani.

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini diarahkan untuk penanganan lahan kritis, penanggulangan bahaya banjir, mempertahankan sumber mata air melalui pengembangan hutan rakyat dan penanaman bibit tanaman serta peningkatan kualitas produksi hasil hutan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program ini diarahkan untuk penyelamatan hutan lindung dan meningkatkan fungsi hutan lindung, penyelamatan satwa yang dilindungi dengan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan pencaangan Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional.

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini diarahkan untuk peningkatan penerapan teknologi informasi bidang pertanian/perkebunan. penerapan teknologi pertanian, dan pengembangan komoditas sesuai spesifik lokasi

6. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

Program ini diarahkan untuk pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan pada industri hasil hutan melalui sosialisasi aturan kehutanan dan operasi peredaran kayu, dan rekomendasi tebang pada hak hutan.

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan dengan penyediaan dan penggunaan benih dan bibit berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pertanian/ perkebunan, mekanisasi pertanian/perkebunan, pengendalian organisme pengganggu tanaman,

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini diarahkan untuk pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Adapun Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana tabel 2.3. berikut.



Tabel. 2.3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
00	PROGRAM SETIAP SKPD					
00 00	-					
00 00 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan perasionalisasi UPT (1 tahun)	1.850.000.000			1.850.000.000
00 00 01 19	Ketatausahaan	Pelayanan administrasi ketatausahaan pada Dinnpertenbunhut Kabupaten Banyumas, 12 bulan	1.500.000.000	Kegiatan Ketatausahaan	Pelayanan administrasi ketatausahaan pada Dinnpertenbunhut Kabupaten Banyumas, 12 bulan	1.500.000.000
00 00 01 20	Operasional UPT Balai Benih Hortikultura	tersedianya 6 jenis tanaman hortikultura dan bioarmaka	100.000.000	guna memelihara tanaman induk di UPT untuk menghasilkan bibit tanaman hortikulura dan biofarmaka untuk dibantukan kpd masyarakat	tersedianya 6 jenis tanaman hortikultura dan bioarmaka	100.000.000
00 00 01 21	Operasional UPT Balai Benih Padi Palawija	tersedianya benih padi unggul dan kedelai unggul	150.000.000	guna operasinal di UPT untuk menghasilkan benih padi dan palawija untuk dibantukan kpd masyarakat	tersedianya benih padi unggul dan kedelai unggul	150.000.000
00 00 01 22	Operasional UPT Kebun Bibit Permanen	tersedianya 30.000 batang bibit tanaman keras	100.000.000	guna operasinal di UPT untuk menghasilkan bibit tanaman keras untuk dibantukan kpd masyarakat	tersedianya 30.000 batang bibit tanaman keras	100.000.000
02	PILIHAN					
02 01	Pertanian					
02 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3 lokasi	450.000.000			450.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 01 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pendampingan pelaku usaha agribisnis di 27 kecamatan	150.000.000	Kegiatan ini untuk membiayai pendampingan dan pembinaan pelaku agribisnis	Pendampingan Lokasi Puap di 159 Lokasi	150.000.000
02 01 15 06	Pendukung kegiatan TNI (TMMD) untuk kegiatan pertanian	Terlaksananya kegiatan pendukung kegiatan TMMD dan pasar murah	100.000.000	Lokasi menyesuaikan kegiatan TNI TMMD	Terlaksananya kegiatan pendukung kegiatan TMMD dan pasar murah	100.000.000
02 01 15 10	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Terselenggaranya pertemuan/ pembinaan kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dan lomba kelembagaan petani pada 27 Kec.	200.000.000	Kegiatan ini mebiayai pertemuan pelatihan kelompok tani	Terselenggaranya pertemuan kelompok tani, lomba kelembagaan petani 27 Kec.	200.000.000
02 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		300.000.000			300.000.000
02 01 17 01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terselenggaranya Promosi dan pameran produk pertanian Perkebunan dan Kehutanan	300.000.000	Kegiatan ini membiayai kegiatan pameran produksi pertanian perkebunan dan kehutanan	Terselenggaranya Promosi dan pameran produk pertanian Perkebunan dan Kehutanan	300.000.000
02 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		3.450.000.000			3.450.000.000
02 01 18 08	Pemutakhiran data dan pengembangan sistem informasi	Terfasilitasinya akses informasi kepada masyarakat dan instansi terkait Tupoksi SKPD	100.000.000	Kegiatan ini membiayai kegiatan pegumpulan data statistik pertanian perkebunan dan kehutanan dan fasilitasi website dinas	Terfasilitasinya akses informasi kepada masyarakat dan instansi terkait Tupoksi SKPD	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 01 18 10	Pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan	penerapan teknologi pertanian tanaman pangan di 27 kec	500.000.000	.Kegiatan ini untuk membeli bibit kedele	.Pengadaan bibit kedele di 3 Kec.	500.000.000
		Pengembangan tanaman kedele di 15 Kec.	500.000.000	.Kegiatan ini untuk membeli bibit kedele	.Pengadaan bibit kedele di 3 Kec.	500.000.000
		.Pengadaan benih padi gogo di 10 Kec.	250.000.000	Kegiatan ini membiayai belanja benih tanaman padi gogo	.Pengadaan benih padi gogo di 3 Kec.	250.000.000
		.Pengadaan benih padi sawah di 27 Kec.	500.000.000	Kegiatan ini membiayai belanja benih tanaman padi sawah	.Pengadaan benih padi sawah di 4 Kec.	500.000.000
		Terlaksananya SLPTT di 27 Kec. Se kab. Banyumas	100.000.000	Kegiatan ini untuk membiayai pendampingan kegiatan SLPTT	Terlaksananya SLPTT di 27 Kec. Se kab. Banyumas	100.000.000
02 01 18 14	Pengembangan Mekanisasi Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	.Pengadaan power treasher 20 unit	300.000.000	..kegiatan ini untuk pengadaan power treasher	.Pengadaan power treasher 20 unit	300.000.000
		tersedianya handtracktor 30 unit di kec. Banyumas	500.000.000	Kegiatan ini untuk membiayai kegiatan pengadaan Handtracktor	tersedianya handtracktor 30 unit di kec. Banyumas	500.000.000
		Tersedianya sarana prasarana pertanian / alsintan di 4 semua kec. di kab. banyumas	200.000.000	kegiatan ini untuk membiayai pengadaan sarana prasarana pertanian / alsintan di seluruh kec.	Tersedianya sarana prasarana pertanian / alsintan di 4 semua kec. di kab. banyumas	200.000.000
		tersedianya kendaraan roda tiga 10 unit	250.000.000	kegiatan ini sesuai usulan musrenbang kec. untuk pengadaan	tersedianya kendaraan roda tiga 10 unit	250.000.000
		tersedianya pompa air di 25 unit	250.000.000	kegiatan ini untuk membiayai pengadaan pompa air,	tersedianya pompa air di 25 unit	250.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 01 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		15.697.500.000			15.697.500.000
02 01 19 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Pelaporan, dan evaluasi untuk bahan perencanaan di tahun ke depan di SKPD	150.000.000	Kegiatan ini membiayai kegiatan motoring, pengumpulan data, dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Pelaporan, dan evaluasi untuk bahan perencanaan di tahun ke depan di SKPD	150.000.000
02 01 19 12	Peningkatan produktifitas tanaman tahunan perkebunan	Meningkatnya populasi dan peremajaan kelapa genjah di seluruh kec. di kab. Banyumas	1.500.000.000	Untuk pengembangan tanaman tahunan perkebunan (kelapa Genjah)	Meningkatnya populasi dan peremajaan kelapa genjah di seluruh kec. di kab. Banyumas	1.500.000.000
		tersedianya bantuan karet di 1 lokasi	25.000.000	Untuk pengembangan tanaman tahunan perkebunan (Karet)	tersedianya bantuan karet di 1 lokasi	25.000.000
		tersedianya bantuan kakao di 3 lokasi	25.000.000	Untuk pengembangan tanaman tahunan perkebunan (kakao)	tersedianya bantuan kakao di 3 lokasi	25.000.000
02 01 19 13	Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	Tersedianya sarana pengendali OPT, 270 unit	540.000.000	Untuk pengadaan sarana pengendali OPT	Tersedianya sarana pengendali OPT, 300 unit	540.000.000
		tersedianya Pengadaan emposan tikus 30 unit	30.000.000	untuk pengadaan emposan tikus	tersedianya Pengadaan emposan tikus 30 unit	30.000.000
		tersedianya belerang 500 kg	15.000.000	pengadaan belerang	tersedianya belerang 500 kg	15.000.000
		tersedianya pestisida 200 kg	15.000.000	untuk pengadaan pestisida	tersedianya pestisida 200 kg	15.000.000
		Terselenggaraeranya kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman di seluruh kec. di kab. banyumas	15.000.000	kegiatan ini untuk membiayai operasional kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman di seluruh kec. di kab. Banyumas	Terselenggaraeranya kegiatan Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman di seluruh kec. di kab. banyumas	15.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 01 19 19	Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian	..Tersedianya jalan usaha tani di 27 Lokasi	3.105.000.000	.kegiatan ini untuk membiayai jalan usaha tani yang berasal	..Tersedianya jalan usaha tani di 27 Lokasi	3.105.000.000
		Tersedianya Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT) 36 Lokasi	4.140.000.000	Kegiatan ini untuk membiayai pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT)	Tersedianya Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT) 36 Lokasi	4.140.000.000
		tersedianya sumur bor untuk 10 lokasi	2.875.000.000	kegiatan ini untuk pengadaan Sumur bor.	tersedianya sumur bor untuk 10 lokasi	2.875.000.000
		tersedianya laboratorium pertanian 1 unit	287.500.000	kegiatan ini untuk membiayai laboratorium pertanian 1 unit	tersedianya laboratorium pertanian 1 unit	287.500.000
02 01 19 28	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pemberian bantuan sarana produksi perkebunan 20 unit dan tanaman cengkeh 20.000 batang	750.000.000	kegiatan ini untuk membiayai pengembangan tanaman cengkeh	Pemberian bantuan sarana produksi perkebunan 20 unit dan tanaman cengkeh 20.000 batang	750.000.000
02 01 18 29	Pengembangan Pertanian Organik	Peningkatan produksi Organik 1 Komoditas	300.000.000	untuk membiayai bantuan pelatihan pertanian organik	Peningkatan produksi Organik 1 Komoditas	300.000.000
02 01 19 30	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Terlindunginya lahan pertanian Produktif	300.000.000	Penyusunan perda Perlindungan LP2B.		
02 01 19 31	Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah	Pengembangan Tanaman Nilam (5 Lokasi)	50.000.000	pengembangan tanaman Nilam	Pengembangan Tanaman Nilam (5 Lokasi)	50.000.000
		Pengembangan Tanaman Cengkeh (9 Lokasi)	400.000.000	pengembangan tanaman Cengkeh	Pengembangan Tanaman Cengkeh (9 Lokasi)	400.000.000
		Pengembangan Tanaman Tembakau (4 Lokasi)	100.000.000	pengembangan tanaman tembakau	Pengembangan Tanaman Tembakau (4 Lokasi)	100.000.000
		tersedianya bibit pala 5.000 batang	50.000.000	pengembangan tanaman tahunan perkebunan (Pala)	tersedianya bibit pala 5.000 batang	50.000.000
		Pengembangan Tanaman Tebu (10 Lokasi)	100.000.000	pengembangan tanaman tebu (10 Lokasi)	Pengembangan Tanaman Tebu (10 Lokasi)	100.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 01 19 35	Pengembangan pertanian hortikultura	Pengembangan tanaman Durian 6 lokasi	100.000.000		Pengembangan tanaman Durian 6 lokasi	100.000.000
		Pengembangan tanaman Jambu Citra 1 lokasi	25.000.000		Pengembangan tanaman Jambu Citra 1 lokasi	25.000.000
		Pengembangan tanaman Duku 2 lokasi	50.000.000		Pengembangan tanaman Duku 2 lokasi	50.000.000
		Pengembangan tanaman manggis 3 lokasi	75.000.000		Pengembangan tanaman manggis 3 lokasi	75.000.000
		Pengembangan tanaman Bengkoang 1 lokasi	25.000.000		Pengembangan tanaman Bengkoang 1 lokasi	25.000.000
		Pengembangan Demplot tanaman hortikultura seluruh kec. di kab. banyumas	600.000.000		Pengembangan Demplot tanaman hortikultura seluruh kec. di kab. banyumas	600.000.000
		Pengembangan Budidaya jamur 2 kec	50.000.000		Pengembangan Budidaya jamur 2 kec	50.000.000
02 02	Kehutanan		0			
02 02 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan		2.175.000.000			2.175.000.000
02 02 16 05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	1.800.000.000		Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air	1.800.000.000
		tersedianya rehabilitasi hutan rakyat di desa 2 lokasi	100.000.000		tersedianya rehabilitasi hutan rakyat di desa 2 lokasi	100.000.000
		tersedianya bantuan bibit tanaman keras 1 lokasi	25.000.000		tersedianya bantuan bibit tanaman keras 1 lokasi	25.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
02 02 16 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya Peran anggota masyarakat dalam membudidayakan dan mengolah hasil tanaman hutan di sekitar hutan (21 Desa)	250.000.000	Kegiatan ini membiayai kegiatan pertemuan kelembagaan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya Peran anggota masyarakat dalam membudidayakan dan mengolah hasil tanaman hutan di sekitar hutan (21 Desa)	250.000.000
02 02 17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		200.000.000			200.000.000
02 02 17 06	Pemeliharaan satwa yang dilindungi	terpeliharanya satwa yang dilindungi (Rusa 25 ekor dan monyet ekor panjang 325 ekor)	100.000.000	Kegiatan ini membiayai pakan dan pemeliharaan kandang hewan/satwa yang di lindungi	terpeliharanya satwa yang dilindungi (Rusa 25 ekor dan monyet ekor panjang 325 ekor)	100.000.000
02 02 16 11	Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional	Jumlah Bibit dalam Pelaksanaan Kegiatan HMPI dan BMN 9.000 batang	100.000.000	kegiatan ini membiayai kegiatan penanaman OBIT	Jumlah Bibit dalam Pelaksanaan Kegiatan HMPI dan BMN 9.000 batang	100.000.000
02 02 19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan		100.000.000			100.000.000
02 02 19 06	Pengendalian peredaran dan penatausahaan hasil hutan	Pengendalian Peredaran dan Penatausahaan Hasil Hutan di seluruh kec. di kab. banyumas	100.000.000	Kegiatan ini membiayai monitoring dan pelaporan penatausahaan hasil hutan	Pengendalian Peredaran dan Penatausahaan Hasil Hutan di seluruh kec. di kab. banyumas	100.000.000
			0			
	TOTAL PAGU		24.122.500.000			24.122.500.000



BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan bagi pencapaian Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2016.

Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi permasalahan pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sebagai upaya ***Mewujudkan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang produktif, efisien, berdaya saing dan lestari berwawasan lingkungan, serta berpotensi investasi, didukung pemerintahan yang bersih dan adil menuju kesejahteraan petani.***